
MENYOAL MULTIKULTURALISME KONTEMPORER: POLITIK KERAGAMAN BUDAYA ATAU POLITISASI KERAGAMAN BUDAYA?

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

^{1,2} Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Unhas Tamalanrea

Email:

1afaisal@unhas.ac.id

2irwanputrabima@gmail.com

ABSTRACT: *At the end of the 20th century, almost in all parts of the world, the issue of diversity of "identity" or of "life politics" resurfaced to become a crucial and political discourse. The issue of cultural diversity which was previously sidelined has now found space and place to be discussed again in contemporary discourses. This diversity is now present in the form of multiculturalism discourse. On the context of Indonesia, since the end of the New Order era, the discourse of multiculturalism has been present in the form of recognition politics or politics of difference. Minority rights or post-national citizenship rights such as ecological rights, cultural rights, and original identity rights are part of the main demands of some people in the country. This article critically analyzes the discourse of multiculturalism in its various practices in (post)modern Indonesia, and examines these contemporary multiculturalism practices in relation to power practices in various state contexts. The method used is the literary method, which uses various sources of literature that discuss the discourse of diversity in Indonesia. The result of the discussion shows how multiculturalism discourse, on one hand, it can be an alternative offer for various essentialist perspectives and for the struggle of diversity in Indonesia, but on the other hand it can also become a crucial and problematic issue, especially in the development of "Indonesianess" discourse in public spaces in the era of freedom.*

Keywords: *Multiculturalism, Politics of Difference, Power Relations, Politics of Sameness*

ABSTRAK: Dipenghujung abad ke-20, hampir di berbagai belahan dunia, persoalan keragaman "identitas" atau "pilihan hidup" kembali mengemuka menjadi wacana yang krusial dan politis. Persoalan keragaman budaya yang dahulunya dipinggirkan, kemudian mendapat ruang dan tempat untuk dibicarakan kembali dalam wacana-wacana kontemporer. Perihal keragaman tersebut kini hadir dalam wujud wacana multikulturalisme. Dalam konteks Indonesia, sejak berakhirnya era Orde Baru, wacana multikulturalisme hadir dalam bentuk politik rekognisi atau politik perbedaan. Hak-hak minoritas atau hak-hak kewarganegaraan pascanasional seperti hak ekologis, hak budaya, dan hak identitas asli menjadi bagian dari tuntutan utama dari sebagian masyarakat di tanah air. Artikel ini menganalisis secara kritis wacana multikulturalisme dalam berbagai praktiknya di era (pasca)modern Indonesia, dan meneroka praktik multikulturalisme kontemporer tersebut dalam relasinya terhadap praktik-praktik kuasa pada berbagai konteks bernegara. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yakni menggunakan beragam sumber kepustakaan yang membahas wacana keragaman di Indonesia. Hasil pembahasan memperlihatkan bagaimana wacana multikulturalisme dapat menjadi tawaran alternatif atas berbagai cara pandang esensialis dan pergulatan keragaman di Indonesia, namun di sisi lain juga

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

dapat menjadi persoalan krusial dan problematis khususnya dalam pembangunan wacana "keindonesian" di ruang-ruang publik dalam era kebebasan.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Politik Perbedaan, Relasi Kuasa, Politik Kesamaan

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita mendengar wacana keberagaman (multikulturalisme) kembali diperbincangkan diberbagai media massa dan tempat. Wacana ini mengemuka dan menjadi tema yang sangat strategis dan penting mengingat semakin majemuk dan kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Pluralitas pun menjadi trend, khususnya sejak dibukanya kran-kran demokrasi. Semua elemen masyarakat turut ramai angkat bicara mempersoalkan wacana keberagaman ini, meskipun sebenarnya realitas keberagaman ini telah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Di penghujung abad XX, hampir di berbagai belahan dunia, persoalan keragaman "identitas" atau politik pilihan hidup" kembali mengemuka menjadi wacana yang krusial. Persoalan "isu keragaman budaya" yang dahulunya dimarginalkan, kemudian mendapat ruang dan waktu untuk didiskusikan, didebat, dan dibicarakan kembali dalam wacana-wacana kontemporer. Kebangkitan "wacana keragaman budaya" ini telah mencerminkan apa yang diistilahkan oleh Jameson (2014) maupun Chaney (2004) sebagai *cultural turn* yang mana telah berlangsung pergeseran (politis) dalam ranah kebudayaan dengan maksud mempertahankan keragaman budaya (multikulturalisme). Munculnya wacana keragaman budaya ini- oleh banyak pengamat sosia budaya- dipandang sebagai tanggapan terhadap berbagai bentuk praktik totaliter dan penyeragaman paradigma yang berkembang pada era modern.

Dalam sejarah perkembangan peradaban, lahirnya era modern ditandai sebagai titik tolak "kedewasaan" manusia dalam mengarungi lautan perjalanan hidupnya. Modernisme diasumsikan sebagai sebuah metanarasi atau narasi besar dalam mencari kebenaran murni (objektif-universal), untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia melalui semangat zaman (*zeitgeist*) "pencerahan", dengan mengandalkan rasio sebagai senjata utamanya. Rasio manusia dianggap mampu menemukan hukum-hukum alam, dan hukum-hukum perkembangan sejarah dan kebudayaan manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan (sains) berpretensi dapat menemukan hukum-hukum dasar dalam bentuk narasi-narasi besar (*grandnarratives*) untuk menjelaskan berbagai realitas (Lubis, 2004: 10-11). Namun dalam perjalanannya, narasi-narasi besar ini pada akhirnya melahirkan praktik-praktik ideologis berupa kolonialisme/imperialisme dalam berbagai bentuknya,

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

menghapus segala perbedaan, meniadakan semua pluralitas, dan memarjinalkan semua yang dipandang tidak sejalan dengan paradigma ilmiah dalam era modern.

Pada beberapa dekade terakhir abad dua puluh, narasi-narasi besar tersebut perlahan-lahan mengalami delegitimasi akibat ketidakmampuannya mewujudkan kehidupan umat manusia menuju arah masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera, sebagaimana yang telah dicita-citakan sebelumnya. Kematian "Sang Metanarasi" dan merebaknya kekecewaan terhadap model-model dan proyek-proyek universal modernisme -yang telah melahirkan kolonialisme/imperialisme- tentang kemajuan umat manusia, seperti nasionalisme, sosialisme, humanisme, dan seterusnya, telah membawa simpati baru terhadap kebangkitan berbagai gerakan partikularisme budaya dan multikulturalisme, khususnya yang menyangkut hak-hak etnisitas dan indegenisitas. Dalam konteks inilah, isu-isu tentang keragaman baik berupa lokalitas, identitas, etnisitas, indegenisitas, terlahir kembali dan memperoleh "haknya" untuk dibicarakan dan dikaji sebagaimana yang disinggung Turner (dalam Davidson, 2010: 7-8) bahwa dipenghujung abad duapuluh telah munculnya *triad* (tiga serangkai) hak-hak kewargaan pascanasional (*post-national citizenship rights*) yaitu hak ekologis, hak budaya, hak identitas asli (sebelum kolonialisme) sebagai bentuk respons terhadap tuntutan hak-hak yang dominan pada modernisme, yakni hak-hak warga, hak suara, dan hak atas kesejahteraan.

Dalam konteks Indonesia, sejak berakhirnya era Orde Baru, hasrat akan kebebasan mendapat ruang untuk terekspresikan kembali setelah sekian lama terbelenggu dalam tirani kekuasaan. Tumbangnya rezim Suharto (seakan) menjadi simbol berakhirnya praktik-praktik hegemoni dan totaliterianisme. Demi kebebasan, setiap kelompok masyarakat menuntut "hak" atas ruang sosial, budaya, dan politik dari keragaman dan perbedaan yang dimilikinya. Atas nama kebebasan pula, orientasi pokok perubahan dan segala jenis perjuangan sosial kemudian mengalami pergeseran tema, dari persoalan menghadapi ketidakadilan dan dominasi, kemudian menjadi (sekadar) persoalan pilihan makna hidup, politik pengakuan (*politics of recognition*), dan politik perbedaan (*politics of difference*). Munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat "politik" yang berlatarbelakang agama, adat, etnik, jender, komunitas, pilihan selera, dan seterusnya yang mewarnai ruang-ruang publik di tanah air belakangan ini akan berimplikasi terhadap mengaburnya agenda persoalan publik yang sesungguhnya.

Beragam perspektif telah lahir dan mewarnai wacana keragaman (multikulturalisme) di Indonesia pada era pascareformasi. Vedi R Hadiz (2015) misalnya menyoroti bagaimana pemain-pemain lama Orde Baru telah "berhasil" mereposisi dirinya dengan cara-cara yang baru dalam konteks dinamika kekuasaan di Indonesia pasca keruntuhan Suharto. Demikian pula Hadiz (2016) memproblematisir kebangkitan populisme Islam menjelang peralihan kepemimpinan nasional.

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

yang banyak meramaikan diskursus panggung politik Indonesia. Turner (2003) mengamati gejala melunturnya rasa kewarganegaraan sebagai implikasi dari menguatnya tuntutan akan hak-hak budaya, lingkungan hidup, dan tanah leluhur. Hal yang sama dilihat oleh Henley dan Davidson (2007) yang mengemukakan wacana menguatnya tuntutan akan implementasi adat atau hukum adat dalam setiap wilayah/daerah di Indonesia. Demikian pula Aspinal dan Fealy (2003) meneroka menguatnya wacana politik lokal di Indonesia pasca reformasi dalam wacana desentralisasi dan demokratisasi, dan pengamatan Nordholt dan van Klinken (2007) mengenai kebangkitan pemerintahan politik lokal pasca kejatuhan rezim Suharto. Pandangan-pandangan tersebut menyoroti persoalan ril yang menimpa bangsa di era pascareformasi, khususnya di era kebangkitan wacana keragaman (multikulturalisme).

Tulisan ini menganalisis secara kritis fenomena menguatnya tuntutan akan pengakuan diri dan politik perbedaan yang dibungkus dalam wacana multikulturalisme yang mana setiap elemen masyarakat menghendaki pengakuan negara atas keragaman identitasnya sekaligus tuntutan hak-hak sosiokulturalnya dalam konteks bernegara. Dengan menjelaskan problem krusial wacana multikulturalisme kontemporer di era pascareformasi, maka secara praktis akan memberi kritikan dan masukan terhadap pengembangan paradigma multikulturalisme yang sedang dipraktikkan oleh bangsa di tanah air. Untuk menganalisis topik fenomena multikulturalisme kontemporer, digunakan perspektif kajian budaya (*cultural studies*) dalam rangka memproblematisir dan mengurai beragam relasi-relasi kuasa (*power relations*) yang membentuk wacana multikulturalisme, termasuk membongkar kepentingan-kepentingan ideologis dan politis di dalamnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengurai dan menganalisis secara kritis wacana multikulturalisme dan relasi-relasi kuasa yang membentuknya dalam konteks pasca reformasi tahun 1998 di tanah air. Penulisan artikel menggunakan metode kepustakaan sebagai metode pengumpulan data yakni mengumpulkan berbagai data pustaka dan referensi yang relevan dengan informasi dan penjelasan mengenai kehadiran wacana multikulturalisme secara global, dan secara spesifik dalam konteks ke-Indonesia-an. Pengambilan data dilakukan melalui teknik baca, catat, dan simak. Pengambilan sample dilaksanakan secara purposif (*purposive sampling*) yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006). Untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan secara komprehensif, digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara kualitatif-deskriptif dan kritis bagaimana formasi wacana multikulturalisme hadir secara global maupun lokal (nasional) yang telah melahirkan tuntutan politis akan wacana

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

keragaman namun juga bagaimana implikasi ideologis dari praktik multikulturalisme yang memunculkan kepentingan relasi kuasa dan politisasi keragaman. Beberapa tahap dilakukan seperti mengobservasi beberapa praktik wacana multikulturalisme di Indonesia, mengumpulkan dan membaca sumber-sumber bacaan yang relevan dengan topik, mencatat fenomena yang ada, menganalisis secara kritis fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan kajian budaya (*cultural studies*), dan terakhir menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari Pluralisme ke Multikulturalisme

Akhir-akhir ini sering kita mendengar wacana keberagaman (multikulturalisme) kembali diperbincangkan di berbagai media massa dan tempat. Wacana ini mengemuka dan menjadi tema yang sangat strategis dan penting mengingat semakin majemuk dan kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Pluralitas pun menjadi trend, khususnya sejak dibukanya kran-kran demokrasi. Semua elemen masyarakat turut ramai angkat bicara mempersoalkan wacana ragam ini, meskipun sebenarnya realitas keragaman ini telah ada sejak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu.

Dalam sejarahnya, wacana multikulturalisme pada awalnya merupakan perjuangan politik kaum imigran kulit hitam dari wilayah Afrika di Amerika Serikat untuk menuntut persamaan hak. Mereka menuntut untuk dihargai hak-hak sipil dan kebudayaannya, yang berbeda dengan kebudayaan orang kulit putih yang beragama Kristen. Sebagai sebuah kebijakan negara, multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara-negara berbahasa Inggris, yang dimulai di wilayah Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan konsensus sosial di antara para elit. Beberapa tahun setelahnya, sejumlah negara Eropa, terutama negara Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Perubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi pokok perdebatan di Inggris dan Jerman, serta beberapa negara lainnya (Bissoondath, 2002).

Dalam konteks Indonesia, sejak berakhirnya era Orde Baru, dan dicanangkannya era reformasi 1998 sebagai titik balik berakhirnya praktek-praktek totaliter dan penyeragaman, isu-isu politik kebudayaan, *politics of recognition*, mengemuka dan berkembang demikian cepat. Isu tersebut salah satunya adalah wacana multikulturalisme. Sebenarnya multikulturalisme telah berkembang sejak lama dengan adanya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencoba membungkus berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, tanpa memperhatikan relasi dan hak setiap perbedaan yang ada. Dari hal tersebut, muncul perbedaan pandangan antara konsep

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

pluralisme dan multikulturalisme. Konsep pluralisme lebih kepada pemahaman atau cara pandang yang menitikberatkan persoalan perbedaan masyarakat satu sama lain tanpa memperhatikan interaksinya, dan melihat keragaman budaya sebagai sebuah kenyataan (Budianta, 2013), sedangkan multikulturalisme merupakan pemahaman dan cara pandang yang menekankan interaksi dan memperhatikan perbedaan setiap identitas/budaya sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara. Dari konsep multikulturalisme inilah kemudian lahir gagasan normatif mengenai kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan dan hak masing-masing identitas dan kebudayaan sebagai penyusun suatu bangsa.

2. Menuju Masyarakat Multikultural

a. Persoalan Identitas dalam Multikulturalisme

Salah satu persoalan yang mendasar dalam wacana multikulturalisme adalah pemahaman dan cara pandang terhadap identitas (kultural). Dalam konstelasi kajian-kajian kebudayaan, setidaknya terdapat dua sudut pandang besar mengenai identitas (Hall dalam Braziel, 2007: 234-238).

Pertama, yaitu pandangan akan identitas yang esensialis. Menurut paham esensialisme, ada hal yang "esensial" dalam diri (*self*) dan kedirian sebagai sebuah "diri yang sebenarnya" (*one true self*) yang meletakkan identitas sebagai penemuan kembali, bukan sebagai produksi kultural, yang cenderung bersifat solid, keras, tunggal, stabil, tertutup, *being*, dan tidak berubah dari masa ke masa (Hall, 1990: 223). Hal ini menghasilkan pandangan tentang identitas terbatas pada sesuatu yang diakui atau ditolak oleh institusi-institusi dominan dalam masyarakat. Pandangan ini biasanya cenderung menyeragamkan (generalisasi) dan mengalamiahkan (naturalisasi) semua persoalan, dan melihat dalam kerangka hitam-putih, yang kemudian melahirkan stereotipe dan pelabelan terhadap suatu identitas. Pandangan kedua, yaitu pandangan akan identitas yang non esensialis, yang melihat identitas sebagai sesuatu yang beragam, cair, terbuka, berproses, berada dalam konteks ruang dan waktu. Identitas dalam pandangan non esensialis, dilihat dalam kerangka "menjadi" daripada "mengada" yang senantiasa tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu (Hall, 1990: 225).

Dari kedua pandangan akan identitas tersebut di atas, identitas esensial yang cenderung melahirkan praktik-praktik marginalisasi dan kekerasan simbolik dalam masyarakat. Secara filosofis, bagaimana pandangan yang memarginalkan ini bisa lahir dalam cara berpikir masyarakat?. Meminjam pandangan dalam teori-teori sosial budaya (khususnya dalam bahasa), yakni pascastrukturalisme (Tyson, 2006: 249-258), yang melakukan kritik terhadap pandangan strukturalisme yang melihat bahwa terdapat "*innate structure*" dalam diri manusia yang dengan

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

struktur tersebut, manusia merepresentasikan relasi-relasi dunia sosialnya lewat bahasa/budaya. Struktur tersebut, misalnya: siang-malam, bapak-ibu, laki-laki-perempuan, seksualitas “heterogen”-seksualitas “homogen” dst, kemudian mempengaruhi cara pandang seseorang ataupun suatu budaya dalam melihat relasi sesuatu. Pandangan ini dalam wacana sosial budaya sering disebut dengan pandangan oposisi biner. Menurut pandangan pascastrukturalisme, model struktur biner ini, secara ideologis, memberikan keistimewaan pada satu struktur pada satu sisi dan merendahkan/meminggirkan struktur lain pada sisi yang lain. Pandangan inilah yang mempengaruhi pandangan identitas yang esensial (monokultur) dalam merepresentasikan seseorang maupun kelompok, yang cenderung menggeneralisir dan kaku dalam melihat budaya.

b. Konsepsi Dasar Multikulturalisme

Pada masyarakat majemuk (plural), pemahaman dan penerimaan terhadap persoalan perbedaan (multikultural) merupakan hal yang sangat penting, sebab tidak saja menyangkut penerimaan interaksi intersubjektif antar masyarakat tapi juga terkait bagaimana negara sebagai regulator masyarakat, mampu mengelola berbagai perbedaan yang ada, yang jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menjadi ancaman disintegratif suatu bangsa/negara.

Perbedaan dalam masyarakat multikultural tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat absolut bertentangan tetapi dua hal yang saling membutuhkan (dialektis). Dalam pandangan dialektis, individu dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, dan kebudayaan serta masyarakat juga dibentuk oleh individu-individu. Identitas (*identity*) dan perbedaan (*difference*) adalah dua kategori yang saling memerlukan. Secara epistemologis, semua pemahaman dan penerimaan bersifat “komparatif”, maksudnya pemahaman diri (*self*) mengharuskan adanya ‘yang lain’ (*the other*). Hanya dengan melalui interaksi, dialog dengan “yang lain” lah saya mengetahui diri saya, dan apa yang berbeda antara saya dan orang lain. Jadi, hubungan individu masyarakat (budaya), “diri” dan “yang lain” memiliki hubungan yang sama. Identitas diri terkait dengan identitas lain (Lubis, 2004: 24-25)

Menurut Bikhu Parekh bahwa istilah multikulturalisme memiliki 3 komponen, yakni pertama, terkait dengan kebudayaan, kedua, merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan ketiga, cara tertentu merespons pluralitas tersebut. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia, suatu doktrin normatif mengenai pandangan spesifik bagaimana kita seharusnya merespons berbagai perbedaan budaya. Ada dua hal yang implisit dalam pandangan Parekh tersebut yaitu pertama soal cara pandang, dan kedua soal kebijakan (*policy*) (Parekh, 2000: 1-15; Parekh dalam Thompson, 1997: 165-169). Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari anekaragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi asasnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

c. Problem Wacana Multikulturalisme dalam Era Kapitalisme Kontemporer

Maraknya gerakan kebangkitan kebudayaan di berbagai tempat dalam beberapa tahun terakhir ini, baik yang diwacanakan dan digerakkan oleh pemerintah dengan dibentuknya pusat-pusat studi kebudayaan (PSK) di beberapa daerah, maupun oleh para lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bentuk bantuan proyek-proyek penelitian dan gerakan revitalisasi kebudayaan, telah memberikan spirit bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai masalah internal maupun eksternal di tanah air, yang bersumber dari kekayaan dan keragaman budaya.

Dalam konteks kebangkitan wacana keragaman budaya, di satu sisi, kembalinya wacana multikulturalisme ini merupakan hal yang menggembirakan karena memberikan ruang hidup bagi berbagai kelompok sosial budaya yang marjinal, yang pada era sebelumnya (era Suharto) diredam atas nama stabilitas nasional, namun di sisi yang lain, hal tersebut tetap menyisakan persoalan tersendiri ketika keragaman tersebut, baik berupa lokalitas, agama, etnisitas, komunitas sosial) kemudian menjadi sebetulnya "barang jualan" (komoditas) yang telah terkomodifikasi dan terobjektifikasi secara total, sebagaimana yang telah disinyalir secara kritis oleh Slavoj Zizek (dalam Robet, 2010: 39-41) bahwa:

"Ketika kita mencoba mempertahankan ruang privat yang otentik dari gempuran perniagaan di ruang publik yang telah teralineasi dan terinstrumentalisasi, privasi itu sendiri berubah menjadi ruang yang terkomodifikasi dan terobjektifikasi secara total. Dengan menarik diri ke dalam privasi, kita justru sebenarnya sedang mengadopsi otentitas palsu yang disodorkan oleh industri kebudayaan".

Menurut Zizek, identitas partikular yang menguat di era kapitalisme kontemporer bukanlah identitas yang mempunyai kedaulatan otentik karena di atas semua gejala partikularisme budaya tersebut, yang sebenarnya terjadi adalah kian menyebar luasnya kapital melalui kapitalisme multinasional dalam wujud industri kebudayaan (*cultural industry*) (Zizek, 2006: 152-182). Dalam konteks ini, kebudayaan tidak lagi diproduksi oleh dan untuk kepentingan masyarakat, melainkan diproduksi oleh industri (kebudayaan telah menjadi sebuah industri). Lebih lanjut menurut Zizek bahwa di alam meluasnya demokrasi liberal dan kebebasan pasar, kebangkitan perayaan politik identitas di era pascamodernisme sesungguhnya hanyalah perayaan beragam perbedaan privat saja, yang sama sekali tidak berdampak terhadap kepentingan publik (Sharpe, 2010: 35-36).

Selain itu, perayaan eksklusif pada wacana multikulturalisme, secara perlahan telah mengikis rasa dan dimensi kebersamaan bangsa (kolektifitas), sebagai implikasi langsung dari menguatnya

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

politik perbedaan di era pascareformasi, sebagaimana pernyataan Zizek (2003: xi) bahwa: *"The right to be defended today is not "the right to difference, but on the contrary and more than ever, the right to Sameness"*. Pernyataan Zizek tersebut di atas mengingatkan kita kepada jalan pikiran Bung Karno (dalam Nasution dan Agustinus, 2006: xxii), yang jauh sebelumnya Zizek, mengatakan:

"Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, negara nasional, *nation state*. Kebangsaan itu adalah kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Kalimantan, bukan kebangsaan Sulawesi, dan lain-lain, melainkan kebangsaan Indonesia".

Perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia menjelang kemerdekaan telah memberi pelajaran berharga yang mana semua kelompok-kelompok etnis mengusung dan meneriakkan panji-panji kemerdekaan, dalam rangka bingkai ke Indonesiaan. Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Sumatra, terus berjuang dengan inisiatif dan caranya masing-masing demi menegakkan Indonesia Raya. Dimensi ke-Sama-an, ke-Kita-an, ke-Indonesia-an telah melampaui segala dimensi ke-perbedaan-an, dan ke-Aku-an, hingga mengantarkan bangsa Indonesia mencapai misi emansipatorisnya membebaskan diri dari kolonialisme.

Seorang tokoh poskolonial India ternama, Gayatri Spivak, secara kritis melihat berbagai representasi kajian keragaman budaya lokal dewasa ini, dengan mengambil berbagai kasus di India. Dalam salah satu artikelnya yang terkenal *Can the Subaltern Speak?*, Spivak (2000) mencoba melihat secara kritis proyek-proyek penelitian keragaman budaya lokal yang mana para kelompok elit (kaum intelektual) memiliki kecenderungan "berbicara atas nama" kondisi subaltern daripada membiarkan "mereka (masyarakat lokal)" berbicara atas nama mereka sendiri, sehingga representasi tersebut tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya, melainkan dalam kepentingan dan bingkai si peneliti.

Demikian pula maraknya perbincangan tentang wacana multikulturalisme dalam bentuk persilangan lokalitas-nasionalitas-globalitas merupakan indikasi untuk memikirkan ulang konsepsi "kedirian" dan persoalan keragaman yang telah mencair dan terpinggirkan sebagai dampak kuasa negara, yang kemudian diperparah oleh gempuran "politik penyeragaman" di era globalisasi saat ini. Tentang wacana kebangkitan keragaman kebudayaan ini, Giddens melihat bahwa saat ini kita tengah berada dalam masa pasca tradisionalisme (*post-traditionalism*). Bukan era kematian atau kepunahan tradisi, melainkan sebaliknya era kebangkitan "tradisi". Akibat gempuran globalisasi, orang-orang mulai tertarik mewacanakan tradisi sebagai sesuatu yang harus diceritakan dan dilanjutkan kembali. Orang bersikap lebih refleksif dan lebih "awas" terhadap gerak-geriknya dan tindakannya lebih berorientasi ke diri (*self-orientation*) dalam rangka melanjutkan proyek

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

kediriannya (*self-actualisation*), sebab proses jaman yang tengah berlangsung telah menimbulkan resiko di segala bidang sehingga fokus diri (*self-focus*) lebih dominan. Hal ini kemudian menjadi "krusial" ketika diperhadapkan dengan isu-isu kepentingan publik.

Hal yang cukup ironis adalah maraknya gerakan-gerakan dan proyek-proyek kedirian di era *post-traditionalism* muncul dalam wujud gerakan revitalisasi kebudayaan yang marak dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi dan daerah di Indonesia, yang di satu sisi membawa semangat untuk menggali kekayaan bumi nusantara namun di sisi lain hanya "menyinggung (menguntungkan)" segelintir pihak saja, sebagaimana yang disinggung oleh Gayatri Spivak dengan kalimat "*Whose voice is it?*" dalam tulisannya *Can the Subaltern Speak?* (Spivak, 2000). Pada aras yang lain, ditengah maraknya gerakan multikulturalisme dan revitalisasi kebudayaan, justru basis-basis material kebudayaan seperti hutan, tanah, air, dan sebagainya mengalami kerusakan parah akibat komodifikasi yang luar biasa (Supeli, 2013). Karlina Supeli dalam pidato kebudayaannya "Kebudayaan dan Kegagapan Kita" (2013) memberi contoh bagaimana hutan-hutan di Kalimantan Timur telah beralih menjadi perkebunan raksasa monokultur, atau telah terbabat habis untuk kepentingan industri perkayuan, dan sisa-sisa galian tambang yang ada dibiarkan menganga meninggalkan kubangan raksasa. Ia memperingatkan bahwa kearifan lokal terus disanjung sebagai tradisi yang perlu dirawat dan diwariskan, sementara rujukan material-spiritualnya kebudayaan justru mengalami kehancuran. Bagi Supeli, bukan tradisi itu sendiri yang ingin dibela, melainkan citra tentang tradisi itu yang telah mengalami komodifikasi dalam wujud pertunjukan (Supeli, 2013).

D. PENUTUP

Mengatasi persoalan "perbedaan keragaman" sosial budaya dalam bingkai berbangsa dan bernegara, tentu saja bukan persoalan sepele, bukan semudah membalikkan telapak tangan. Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada negara untuk mengelola wacana multikulturalisme tanpa pelibatan warga negara, tentu bukan hal yang baik, sebab belajar dari pengalaman masa lalu, bagaimana kontrol kekuasaan Orde Baru yang sentralistis dan otoriter telah mendikte dan memberangus segala perbedaan dan hak-hak minoritas untuk kelangsungan kekuasaan. Sebaliknya, melimpahkan segala kebebasan kepada masyarakat tanpa regulasi oleh negara juga dapat bermuara kepada "politik identitas" yang membabi buta, yang dapat menjadi ancaman keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disaksikan bagaimana kelompok-kelompok tertentu telah menjadi "polisi" terhadap kelompok lain, identitas lain, dan mengambil alih kekuasaan negara, sebagai "pengontrol" kehidupan sosial budaya, yang hal tentu saja hal tersebut dapat mengancam dan melemahkan ketentraman dan kehidupan berbangsa dan bernegara,

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

bahkan dapat menimbulkan perang saudara dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk menuju masyarakat multikultural sebagai proses “menjadi”, maka setidaknya-tidaknya ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam pewacanaan multikulturalisme.

Pertama, karena multikulturalisme adalah masalah cara pandang (paradigma) maka hal yang penting diwacanakan adalah pendidikan. Mengapa lewat pendidikan?. Pendidikan merupakan medium memperluas cakrawala dan membuka horizon. Pendidikan yang inklusif dan terbuka akan menghasilkan perspektif dan cara pandang yang inklusif dan terbuka pula, dan demikian pula sebaliknya. Pendidikan multikulturalisme merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan sejak dini, mulai dari tingkat terkecil (keluarga) hingga masyarakat, baik pendidikan yang bersifat formal maupun nonformal. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk merancang model kurikulum pendidikan multikultural yang sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an. Melalui pendidikan multikultural, pemahaman dan penerimaan “yang lain” sebagai bagian dari “diri”, perlahan-lahan diharapkan dapat tertanam dalam diri setiap individu sejak dini sehingga pandangan-pandangan esensialis terhadap perbedaan dapat direduksi.

Kedua, karena multikulturalisme menyangkut regulasi oleh negara untuk kepentingan publik, maka pelibatan semua pihak (partisipasi publik) oleh negara untuk mengembangkan sebuah kultur politik bersama yang memungkinkan jembatan antarperbedaan dibangun melalui partisipasi seluruh warga dalam membentuk tatanan politik demokratis dengan menempatkan diskursus tentang hak minoritas dan perbedaan budaya ke dalam kerangka integrasi. Tentu saja partisipasi publik di sini mengadaikan adanya rasionalitas komunikasi yang jujur, adil, dan setara dalam interaksi dan dialog publik sehingga kultur politik dan regulasi yang dihasilkan betul-betul mencerminkan pandangan-pandangan yang rasional. Tanpa komunikasi yang rasional, maka hanya akan menempatkan “perbedaan identitas” sebagai objek instrumental, bukan sebagai subjek-subjek (intersubjektif) yang dewasa dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. and Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Desentralisation and Democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Bissoondath, N. (2002). *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism*. Penguin
- Budianta, M. (2003). Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum, *Tsaqafah*, Vol 1(2), pp. 8
- Chaney, D. 2004. *The Cultural Turn: Scene Setting Essays on Contemporary Cultural History*. Routledge.

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?

- Davidson, J., S. et all. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta
- Giddens, A. (2013). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Polity Press
- Hadiz, V., R. (2005), *Dinamika Kuasaan Ekonomi Politik Pasca Suharto*. LP3S
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. Cambridge
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (ed), *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222-237). Lawrence and Wishart
- Hall, S. (2007). Cultural Identity and Diaspora. In D. Braziel and J. Evans (Eds), *Theorizing Diaspora* (pp. 234-236). Blackwell Publishing.
- Henly, D. and Davidson, J. S. (2007). Introduction: Radical Conservatism – the Protean Politics of Adat. In D. Henley and J. S. Davidson (Eds). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. London dan New York: Routledge.
- Jameson, Fredric. 2014. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*.
- Lubis, A., Y. (2004). Memahami Cultural Studies dan Multikulturalisme dari Perspektif Pascamodern. *Wacana*, Vol. 6 (2) (pp. 10-11). Universitas Indonesia
- Moleong, L., J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, I. and Agustinus, R. (2006). Pengantar. In I. Nasution and R. Agustinus (eds), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* (pp. xxii). Brighten Institute
- Nordholt, S., H and van Klinken, G. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor
- Parekh, B. 1997. National Culture and Multiculturalism. In K. Thompson (ed), *Media and Cultural Regulation* (pp.165-169). Sage Publications and The Open University.
- Parekh, B. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Palgrave
- Robet, R. (2010). *Manusia Politik: Subjek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek*. Marjin Kiri
- Sharpe, M. and Boucher, G. (2010). *Zizek and Politics: A Critical Introduction*. Edinburgh University Press
- Spivak, G. C., (1998). Can the Subaltern Speak. In C. Nelson & L. Grossberg (eds), *Marxism and The Interpretation of Culture*. Macmillan Education
- Supeli, K. (2013). Kebudayaan dan Kegagapan Kita. In M. Andan and M. Suryawijaya (eds), *Imajinasi Kebudayaan: Kompilasi Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 1998-2013*. Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia
- Tyson, L. (2006). *Critical Theory Today*. Routledge.

- Woodward, K. (1997). Introduction. In K. Woodward (ed), *Identity & Difference*. Sage & Open University
- Zizek, S. (2006). Multiculturalism, or, the Cultural Logics of Multinational Capitalism. In R. Butler and S. Stephens (eds). *The Universal Exception* (pp. 151-183). Continuum
- Zizek, S. (2003). Foreword. In P. Hallward. *Badiou: A Subject to Truth* (pp. xi). University of Minnesota Press

CaLLs



Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni

"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"

Andi Faisal^{1*}, Irwanto²

Menyoal Multikulturalisme Kontemporer : Politik Keragaman Budaya atau Politisasi Keragaman Budaya ?